



Perseteraan BPK-Ahok Memanas

JURU Bicara BPK R Yudi Ramdan menyebutkan bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbohong soal BPK yang memeriksa uang sayur atau makan yang digunakan pejabat. Hal itu terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014 yang menyandang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Seolah-olah, Ahok tidak menerima penyematan opini tersebut.

Pasalnya, BPK hanya memeriksa biaya operasional belanja modal dan pekerjaan pengadaan barang atau infrastruktur. "Apa yang disampaikan Ahok soal BPK memeriksa lauk-pauk tidak benar. Kami hanya memeriksa belanja operasional. Yang dimaksud rinci di sini, kita memastikan semua pertanggungjawaban itu sesuai dengan ketentuan," ujar dia di kantor BPK di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin (8/7).

Yudi mencontohkan, jika seorang pejabat membelanjakan uang untuk operasional pekerjaan, pejabat itu harus mengeluarkan bukti penggunaannya. BPK-lah yang bertugas untuk memastikan keberadaan bukti-bukti tersebut. "Satu rupiah pun ia menggunakan uang atas nama negara, maka ia harus memberikan buktinya, memberikan pertanggungjawabannya," tegas dia.

Selain itu, Yudi juga mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada Provinsi DKI Jakarta, nilai WDP itu disebabkan permasalahan tahun 2013 belum tuntas ditindaklanjuti dan ada permasalahan lain pada tahun 2014. "Selain permasalahan tersebut, BPK juga menemukan permasalahan lain yang menjadi perhatian antara lain, kerjasama pemanfaatan Aset Tanah seluas 30,88 hektar, pembelian sebidang tanah untuk keperluan Rumah Sakit di Jakarta Barat, Penetapan Nilai Penyertaan Modal dan Penyerahan Aset DKI kepada BUMD," beber dia.

Terdapat juga, sambung Yudi, kegiatan penanggulangan kerusakan jalan, kelebihan pembayaran biaya premi asuransi dan kesehatan. Hal lainnya berkaitan dengan administrasi pengelolaan Dana Biaya Operasional Pendidikan. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan atau kecurangan yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, hal ini harus diungkapkan dalam LHP. "BPK memiliki standar pemeriksaan yang ketat dan dilakukan proses quality control dan quality assurance yang diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)," tegas dia.

Sebelumnya Gubernur Ahok sempat protes dengan sejumlah poin pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap dirinya. Terdapat petugas BPK yang menghancurkan dia memberi laporan untuk uang makan pribadinya. Seperti diketahui, hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 bersifat final melalui sistem pengendalian mutu yang sistematis dan terukur. (**wok/pes**)